

Perspektif Mobilitas Penduduk Indonesia

SUKANTO*

Dalam menegara, bangsa Indonesia telah memilih dasar-dasar kebangsaan dan kenegaraannya sendiri. Yang paling asasi adalah Pancasila, yang telah ditetapkan menjadi ideologi negara; dan, Undang-undang Dasar 1945, yang juga telah ditetapkan menjadi undang-undang dasar negara. Di samping itu, bangsa Indonesia juga telah memilih cara pandangnya sendiri dalam mewujudkan cita-cita nasionalnya, yaitu yang dituangkan dalam konsepsi nasional, Wawasan Nusantara, yang mencakup perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, satu kesatuan sosial dan budaya, satu kesatuan ekonomi, serta satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Dalam dasar-dasar kebangsaan dan kenegaraan itu, terkandung pokok-pokok pikiran, antara lain bahwa negara memberi peluang seluas-luasnya kepada setiap penduduk untuk menciptakan kesejahteraan, terutama dalam hal memilih tempat tinggal, pekerjaan dan kehidupan yang layak.

Sejak tahun 1969, pemerintah juga telah melancarkan pembangunan dalam segala bidang kehidupan negara dan masyarakat. Data-data tentang pelaksanaan pembangunan nasional, menunjukkan bahwa seluruh bidang kehidupan negara dan masyarakat, cenderung semakin meningkat. Adanya peningkatan itu, menunjukkan bahwa pembangunan nasional telah membuka berbagai peluang nyata bagi kehidupan yang lebih baik, sehingga merangsang sejumlah penduduk untuk melakukan mobilitas, baik mobilitas horisontal maupun vertikal. Lagi pula, pembangunan nasional yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan urutan prioritas dan kemampuan yang ada, juga telah menimbulkan ketidaksamaan pertumbuhan daerah-daerah dan bidang-bidang kehidupan masyarakat. Ketidaksamaan pertumbuhan itu, juga merupakan faktor yang merangsang terjadinya mobilitas penduduk, yaitu mengalirnya

* Staf CSIS

sejumlah tenaga kerja ke bidang-bidang kehidupan yang lebih maju, dan terjadinya perpindahan penduduk ke daerah-daerah yang berkembang lebih pesat.

Mobilitas penduduk bermacam-macam bentuknya, yaitu ada yang berupa urbanisasi, transmigrasi, perpindahan penduduk ke negara-negara lain, dan kembali lagi ke desa-desa asalnya. Dalam perpindahan penduduk itu, ada perpindahan dari tempat asalnya untuk selama-selamanya, atau yang lebih dikenal dengan istilah migrasi selama hidup atau *life time migration*; perpindahan penduduk yang berlangsung hanya untuk sementara waktu, atau yang lebih dikenal dengan sebutan sirkulasi; dan, ada penduduk yang bekerja di luar desa atau kotanya, tetapi mereka kembali lagi pada hari itu juga, atau yang lebih dikenal dengan istilah penglaju.¹

Berbagai macam bentuk mobilitas penduduk itu, mempunyai manfaat ganda, yaitu dapat merangsang kemajuan bidang-bidang kehidupan yang potensial, serta menumbuhkan daerah-daerah asal dan tujuan. Namun demikian, jika mobilitas penduduk tidak terkendali, tidak mustahil akan menghambat pembangunan nasional, yaitu terutama menimbulkan penyebaran penduduk tidak merata dan tidak proporsional dengan kemampuan lingkungannya, misalnya kelangkaan tenaga kerja yang produktif di desa-desa asal, timbulnya perkampungan miskin baru di kota-kota dan semakin tingginya kepadatan penduduk beberapa daerah tujuan. Karena mobilitas penduduk berkaitan erat dengan pembangunan nasional, maka perlu diperhatikan secara saksama, agar mobilitas penduduk tidak menjadi penghambat, sebaliknya justru dapat menjadi penunjang pembangunan nasional.

KEADAAN DAN PERTUMBUHAN DAERAH

Negara Indonesia adalah negara kepulauan, yang wilayahnya terdiri dari sekitar 13.000 pulau. Pulau-pulau itu terletak di sebelah utara dan selatan garis katulistiwa, serta keadaan geografi, iklim dan kekayaan alamnya berbeda-beda. Keadaan yang berbeda-beda itu, yaitu terutama tentang perbedaan letak yang strategis dan tidak strategis, serta besar dan kecilnya potensi kekayaan alamnya, merupakan faktor utama yang menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijaksanaan pemerintah dan penanaman modal oleh pihak swasta. Hal itu terlihat dalam beberapa kebijaksanaan pemerintah, yaitu antara lain pada masa yang silam, Pemerintah Hindia Belanda menjalankan "Politik Untung Rugi," yang hanya memperhatikan

¹ Sidney Goldstein, *Sirkulasi dalam Konteks Mobilitas Total di Asia Tenggara* (Yogyakarta: PPSK—UGM, 1980), hal. 36.

Tabel 1

**PRODUK DOMESTIK BRUTO DAERAH-DAERAH
ATAS DASAR HARGA KONSTAN 1975**

Propinsi	1975 (Milyar Rp)	1979 (Milyar Rp)	Pertumbuhan 1975—79 (%)	PDB Per Kapita 1979 (Rp)
1. D.I. Aceh	211,5	508,8	24,54	205.165
2. Sumatera Utara *	688,3	953,4	8,49	118.135
3. Sumatera Barat *	159,5	953,4	—	—
4. Riau, dengan minyak	1.806,5	1.681,9	-1,77	816.673
Riau, tanpa minyak	166,2	213,0	6,40	103.447
5. Jambi, dengan minyak	86,4	128,5	10,43	95.747
Jambi, tanpa minyak	79,5	123,2	11,57	91.772
6. Sumsel, dengan minyak	532,8	702,1	7,14	158.510
Sumsel, tanpa minyak	387,9	586,4	10,89	132.384
7. Bengkulu	31,7	51,8	13,09	71.349
8. Lampung	232,0	323,5	8,67	82.753
9. DKI Jaya	1.036,9	1.526,0	10,16	244.719
10. Jawa Barat	1.720,7	2.345,9	8,06	88.070
11. Jawa Tengah	1.289,7	1.732,3	7,65	70.618
12. D.I. Yogyakarta	146,2	171,2	4,04	62.718
13. Jawa Timur	1.770,3	2.241,9	6,08	78.334
14. Kalbar	167,4	230,2	8,28	95.761
15. Kalteng	63,8	109,0	14,34	120.769
16. Kalsel	131,4	202,9	11,48	98.066
17. Kaltim, dengan minyak	449,4	1.035,1	23,19	972.657
Kaltim, tanpa minyak	177,2	379,2	20,96	356.391
18. Sulawesi Utara**	149,4	203,8	8,07	101.956
19. Sulawesi Tengah	56,8	80,8	9,20	69.051
20. Sulawesi Selatan	358,5	523,4	9,93	90.909
21. Sulawesi Tenggara	50,8	64,6	6,17	73.081
22. Bali	153,0	217,9	9,25	90.536
23. NTB	100,6	131,7	6,97	49.154
24. NTT	93,4	128,1	8,20	48.784
25. Maluku	102,5	150,3	10,04	115.894
26. Irija, dengan tambang	212,4	269,6	6,14	237.507
Irija, tanpa tambang	82,8	127,6	11,43	112.451
27. Timor Timur	—	—	—	—

Keterangan: * Atas dasar harga konstan 1973;

 ** Atas dasar harga konstan 1974.

Sumber: BPS, *Pendapatan Regional Propinsi-propinsi di Indonesia 1975 — 1979.*

Tabel 2

PERSENTASE LUAS DAERAH DAN KEPADATAN PENDUDUK INDONESIA
TAHUN 1961, 1971 DAN 1980 MENURUT PROPINSI DAN KEPULAUAN

PROPINSI/KEPULAUAN Province/Island	LUAS (km ²)	PERSENTASE DARI LUAS SELURUH INDONESIA	PERSENTASE TERHADAP PENDUDUK INDONESIA			KEPADATAN PENDUDUK PER KM ²		
			31 OKTO- BER 1961	24 SEP- TEMBER 1971	31 OKTO- BER 1980	31 OKTO- BER 1961	24 SEP- TEMBER 1971	31 OKTO- BER 1980
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. D.I. Aceh	55 392	2.88	1.68	1.68	1.77	29	36	47
2. Sumatera Utara	70 787	3.69	5.11	5.55	5.67	70	93	118
3. Sumatera Barat	49 778	2.59	2.39	2.34	2.31	47	56	68
4. Riau	94 562	4.93	1.27	1.38	1.47	13	17	23
5. Jambi	44 924	2.34	0.76	0.84	0.98	17	22	32
6. Sumatera Selatan	103 688	5.40	2.86	2.89	3.14	27	33	45
7. Bengkulu	21 168	1.10	0.42	0.44	0.52	19	24	36
8. Lampung	33 307	1.74	1.72	2.33	3.14	50	83	139
SUMATERA	473 606	24.67	16.21	17.45	19.00	33	44	59
9. DKI Jakarta	590	0.03	3.06	3.84	4.41	5 039	7 761	11 023
10. Jawa Barat	46 300	2.41	18.14	18.14	18.61	380	467	593
11. Jawa Tengah	34 206	1.78	18.96	18.35	17.20	538	640	742
12. D.I. Yogyakarta	3 169	0.17	2.31	2.09	1.87	707	785	888
13. Jawa Timur	47 922	2.50	22.48	21.41	19.79	455	532	609
JAWA	132 187	6.89	64.95	63.83	61.88	476	576	690
14. Bali	5 561	0.29	1.84	1.78	1.67	320	381	444
15. Nusa Tenggara Barat	20 177	1.05	1.86	1.85	1.85	90	109	135
16. Nusa Tenggara Timur	47 876	2.49	2.03	1.92	1.86	41	48	57
17. Timor Timur	14 874	0.78	-	-	0.38	-	-	37
NUSA TENGGARA	88 488	4.61	5.73	5.55	5.76	63	75	96
18. Kalimantan Barat	146 760	7.65	1.63	1.69	1.68	11	14	17
19. Kalimantan Tengah	152 600	7.95	0.51	0.59	0.65	3	5	6
20. Kalimantan Selatan	37 660	1.96	1.52	1.42	1.40	39	45	55
21. Kalimantan Timur	202 440	10.55	0.57	0.62	0.83	3	4	6
KALIMANTAN	539 460	28.11	4.23	4.32	4.56	8	10	12
22. Sulawesi Utara	19 023	0.99	1.35	1.44	1.43	69	90	111
23. Sulawesi Tengah	69 725	3.63	0.71	0.77	0.87	10	13	18
24. Sulawesi Selatan	72 781	3.79	4.65	4.34	4.11	62	71	83
25. Sulawesi Tenggara	27 686	1.44	0.58	0.60	0.64	20	26	34
SULAWESI	189 216	9.85	7.29	7.15	7.05	38	45	55
26. Maluku	74 505	3.88	0.81	0.92	0.96	11	15	19
27. Irian Jaya	421 981	21.99	0.78	0.78	0.79	2	2	3
MALUKU+IRIAN JAYA	496 486	25.87	1.59	1.70	1.75	3	4	5
INDONESIA	919 443	100.00	100.00	100.00	100.00	51	62	77

daerah-daerah yang potensi kekayaan alamnya bernilai ekonomis sangat besar. Kebijakan semacam itu tidak hanya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, melainkan juga mempengaruhi pertumbuhan dan mobilitas penduduk di setiap daerah.

Dalam Tabel 1, terlihat bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) dan pertumbuhan PDB setiap propinsi, tidak sama. PDB propinsi-propinsi di Pulau Jawa, Riau, Kalimantan Timur dan Irian Jaya, relatif lebih besar daripada propinsi-propinsi lainnya, karena propinsi-propinsi tersebut keadaan geografi, iklim dan potensi kekayaan alamnya lebih baik. Di samping itu, perbandingan PDB beberapa daerah dengan dan tanpa kekayaan alam yang bernilai ekonomis besar, ternyata juga sangat menyolok. Yaitu, antara lain PDB Propinsi Riau dalam tahun 1979 dengan minyak bumi tercatat Rp. 1.681,9 milyar, sedangkan tanpa minyak bumi hanya sebanyak Rp. 213,0 milyar; PDB Propinsi Kalimantan Timur dengan minyak bumi tercatat Rp. 1.035,1 milyar, sedangkan tanpa minyak bumi hanya sebanyak Rp. 379,2 milyar; dan, PDB Propinsi Irian Jaya dengan pertambangan tercatat Rp. 269,6 milyar, sedangkan tanpa nilai tambang hanya sebanyak Rp. 127,6 milyar. Selain itu, juga terlihat bahwa pertumbuhan PDB Propinsi Daerah Istimewa Aceh selama tahun 1975 - 1979 paling tinggi, yaitu sebesar 24,5% Ini mungkin sekali terjadi akibat banyaknya penanaman modal dan sudah beroperasinya perusahaan gas alam cair di propinsi tersebut.

Di samping itu, dalam Tabel 2, terlihat bahwa persebaran penduduk Indonesia hingga tahun 1980, masih belum merata, yaitu, sebanyak 61,88 % berada di Kepulauan Jawa yang luasnya hanya 6,89 % dari luas wilayah Indonesia; sebanyak 19,00 % berada di Kepulauan Sumatera yang luasnya 24,67 % dari luas wilayah Indonesia; sebanyak 7,05 % berada di Kepulauan Sulawesi yang luasnya 9,85 % dari luas wilayah Indonesia; sebanyak 5,76 % berada di Kepulauan Nusa Tenggara yang luasnya 4,61 % dari luas wilayah Indonesia; sebanyak 4,56 % berada di Kepulauan Kalimantan yang luasnya 28,11 % dari luas wilayah Indonesia; dan, hanya 1,75 % yang berada di Kepulauan Maluku dan Irian Jaya, padahal luasnya 25,87 % dari luas seluruh wilayah Indonesia. Masih memusatnya sebagian besar penduduk Indonesia di Pulau Jawa, mungkin sekali karena berbagai sektor ekonominya, baik sektor pertanian maupun non-pertaniannya, masih berkembang dan memberi penghidupan yang layak, sehingga penduduknya enggan meninggalkan Pulau Jawa, bahkan pertumbuhan kota-kota besarnya menjadi daya tarik penduduk kepulauan lainnya.

Namun demikian, jika data dalam Tabel 3 dihubungkan dengan Tabel 1, terlihat adanya gejala-gejala yang sangat positif, yaitu daerah-daerah luar Pulau Jawa yang pertumbuhan ekonominya lebih tinggi daripada pertumbuh-

Tabel 3

PERTUMBUHAN KEPADATAN PENDUDUK INDONESIA

PROPINSI/KEPULAUAN	Kepadatan Penduduk Per Km ²			Pertumbuhan (%)	
	1961	1971	1980	'61—'80	'71—'80
1. D.I. Aceh	29	36	47	62,06	30,55
2. Sumatera Utara	70	93	118	68,57	26,88
3. Sumatera Barat	47	56	68	44,68	21,42
4. Riau	13	17	23	76,92	35,29
5. Jambi	17	22	32	88,23	45,45
6. Sumatera Selatan	27	33	45	66,66	36,36
7. Bengkulu	19	24	36	89,47	50,00
8. Lampung	50	83	139	178,00	67,46
<i>SUMATERA</i>	33	44	59	78,78	34,09
9. DKI Jakarta	5.039	7.761	11.023	118,75	42,03
10. Jawa Barat	380	467	593	56,05	26,98
11. Jawa Tengah	538	640	742	37,91	15,93
12. D.I. Yogyakarta	707	785	868	22,77	10,57
13. Jawa Timur	455	532	609	33,84	14,47
<i>JAWA</i>	476	576	690	44,95	19,79
14. Bali	320	381	444	38,75	16,53
15. Nusa Tenggara Barat	90	109	135	50,00	23,85
16. Nusa Tenggara Timur	41	48	57	39,02	18,75
17. Timor Timur	—	—	37	—	—
<i>NUSA TENGGARA</i>	63	75	96	52,38	28,00
18. Kalimantan Barat	11	14	17	54,54	21,42
19. Kalimantan Tengah	3	5	6	100,00	20,00
20. Kalimantan Selatan	39	45	55	41,02	22,22
21. Kalimantan Timur	3	4	6	100,00	50,00
<i>KALIMANTAN</i>	8	10	12	50,00	20,00
22. Sulawesi Utara	69	90	111	60,86	23,33
23. Sulawesi Tengah	10	13	18	80,00	38,46
24. Sulawesi Selatan	62	71	83	33,87	16,90
25. Sulawesi Tenggara	20	26	34	70,00	30,76
<i>SULAWESI</i>	38	45	55	44,73	22,22
26. <i>MALUKU</i>	11	15	19	36,36	26,66
27. <i>IRIAN JAYA</i>	2	2	3	50,00	50,00
<i>INDONESIA</i>	51	62	77	50,98	24,19

Sumber: BPS, Statistik Indonesia 1983, hal. 44

an daerah-daerah di Pulau Jawa, ternyata pertumbuhan kepadatan penduduknya lebih tinggi daripada pertumbuhan kepadatan penduduk daerah-daerah di Pulau Jawa. Hal ini, terlihat bahwa pertumbuhan kepadatan penduduk Kepulauan Sumatera dari tahun 1961 hingga tahun 1980 meningkat 78,78 % dan dari tahun 1971 hingga tahun 1980 meningkat 34,09 %; dan, pertumbuhan kepadatan penduduk Kepulauan Kalimantan dari tahun 1961 hingga tahun 1980 meningkat 50,00 % dan dari tahun 1971 hingga tahun 1980 meningkat 20,00 %; sedangkan pertumbuhan kepadatan penduduk Pulau Jawa dari tahun 1961 hingga tahun 1980 hanya 44,95 % dan dari tahun 1971 hingga tahun 1980 hanya 19,79 %. Hal itu berarti, pertumbuhan ekonomi daerah-daerah di luar Pulau Jawa telah merangsang terjadinya mobilitas penduduk, terutama mampu menarik para migran dan sirkulator dari daerah-daerah yang penduduknya padat.

KECENDERUNGAN MOBILITAS PARA MIGRAN

Data-data dari Biro Pusat Statistik (BPS),² menunjukkan bahwa perpindahan penduduk di Indonesia semakin meningkat. Dalam Tabel 3, terlihat bahwa jumlah para migran dalam tahun 1971 tercatat sebanyak 2.777.000 orang dan dalam tahun 1980 sebanyak 5.303.000 orang, atau mengalami kenaikan sebanyak 90,96 %. Di samping itu, juga terlihat bahwa persentase para migran ke Pulau Jawa dan Sumatera, cenderung semakin menurun, sebaliknya para migran ke kepulauan dan pulau-pulau lainnya, cenderung semakin meningkat. Perkembangan perpindahan penduduk itu merupakan suatu gejala yang positif, terutama bagi usaha pemerataan penyebaran penduduk antar pulau di Indonesia.

Namun demikian, jika diamati lebih mendalam, perkembangan tersebut juga masih mengandung hal-hal yang memprihatinkan, terutama karena baik dalam tahun 1971 maupun 1980, Pulau Jawa masih menjadi tujuan utama para migran dari pulau-pulau lainnya. Sebagian besar para migran yang ke Pulau Jawa itu, ternyata menetap di kota-kota besar, terutama Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, yang juga menjadi pusat urbanisasi penduduk pedesaan Pulau Jawa sendiri. Dalam Tabel 4, terlihat bahwa jumlah para migran dari Pulau Jawa dalam tahun 1971 sebanyak 1.935 ribu orang atau 69,67 % dan dalam tahun 1980 sebanyak 3.584 ribu orang atau 67,58 % dari seluruh migran, sedangkan yang masuk dalam tahun 1971 sebanyak 583 ribu orang atau 20,99 % dan dalam tahun 1980 sebanyak 1.092 ribu orang atau 20,59 % dari seluruh migran. Dengan demikian, jumlah netto migran dari Pulau Jawa hanya sebanyak 1.352.000 orang dalam tahun 1971 dan sebanyak 2.492.000

²BPS, *Analisa Migrasi Indonesia, dan Perpindahan Penduduk Antar Propinsi di Indonesia*.

Tabel 4

**MIGRAN SELAMA HIDUP ANTAR PULAU
1971 DAN 1980**

Propinsi Asal	Tahun	Propinsi Tujuan (ribuan)					Jumlah
		Sumatera	Jawa	Kali- mantan	Sulawesi	Kepulau- an lain	
Sumatera	1971	—	348	7	8	6	369
	(%)	—	94,30	1,89	2,16	1,62	100
	1980	—	718	26	23	20	787
	(%)	—	91,23	3,30	2,92	2,54	100
Jawa	1971	1.735	—	90	57	53	1.935
	(%)	89,66	—	4,65	2,94	2,73	100
	1980	2.906	—	374	167	137	3.584
	(%)	81,08	—	10,43	4,65	3,82	100
Kalimantan	1971	17	75	—	6	2	100
	(%)	17,00	75,00	—	6,00	2,00	100
	1980	19	122	—	10	5	156
	(%)	12,17	78,20	—	6,41	3,20	100
Sulawesi	1971	90	98	23	—	52	263
	(%)	34,22	37,26	8,74	—	19,77	100
	1980	145	137	123	—	140	545
	(%)	26,60	25,13	22,56	—	25,68	100
Kepulauan lain	1971	28	62	3	17	—	110
	(%)	25,45	56,36	2,72	15,45	—	100
	1980	31	115	11	74	—	231
	(%)	13,41	49,78	4,76	32,03	—	100
Jumlah	1971	1.870	583	123	88	113	2.777
	(%)	67,33	20,99	4,42	3,16	4,06	100
	1980	3.101	1.092	534	274	302	5.303
	(%)	58,47	20,59	10,06	5,16	5,69	100

Keterangan : tidak termasuk yang lahir di luar negeri, Timor-Timur dan mereka yang tempat lahirnya tidak terjawab.

Sumber: BPS, *Perpindahan Penduduk Antar Propinsi di Indonesia*.

orang dalam tahun 1980 atau hanya sebesar 2,72 % dari seluruh penduduk Pulau Jawa dalam tahun 1980.

Kepulauan Sumatera juga masih menjadi tujuan para migran yang ke-2 setelah Pulau Jawa, tetapi jika ditinjau dari jumlah migran yang masuk, Kepulauan Sumatera merupakan penerima migran yang terbesar. Jumlah migran yang masuk sebanyak 1.870 ribu orang dalam tahun 1971 atau 67,33 % dan sebanyak 3.101 ribu orang dalam tahun 1980 atau 58,47 % dari seluruh migran, sedangkan yang keluar hanya 369 ribu orang dalam tahun 1971 atau 13,28 % dan sebanyak 787 ribu orang dalam tahun 1980 atau 14,84 % dari seluruh migran. Dari jumlah migran yang masuk itu, ternyata sebagian besar berasal dari Pulau Jawa, yaitu sebanyak 1.735 ribu orang dalam tahun 1971 atau 92,78 % dan sebanyak 2.906 ribu orang dalam tahun 1980 atau 93,71 %. Akan tetapi, sebagian besar migran yang keluar ternyata menuju Pulau Jawa, yaitu sebanyak 318 ribu orang dalam tahun 1971 atau 94,30 % dan sebanyak 718 ribu orang dalam tahun 1980 atau 91,23 %.

Berdasarkan data-data migrasi tersebut, diperoleh suatu kesan bahwa mobilitas penduduk selama tahun 1971 hingga 1980, belum banyak artinya bagi usaha pemerataan penyebaran penduduk dan pengembangan wilayah. Karena, perpindahan penduduk yang masih memusat ke Kepulauan Sumatera dan Jawa, akan meningkatkan kepadatan penduduk dua kepulauan itu, sehingga daya dukung lingkungannya pun akan semakin menurun. Jika mobilitas penduduk itu berlangsung terus-menerus, maka keseimbangan kepadatan penduduk dan daya dukung lingkungannya akan menjadi tidak proporsional lagi, sehingga dapat menghambat usaha pengembangan wilayah dan peningkatan kesejahteraan penduduk kedua kepulauan itu. Lagi pula, sebagian besar migran yang masuk ke Pulau Jawa menuju ke kota-kota besar yang juga menjadi tujuan utama perpindahan penduduk dari desa-desa Pulau Jawa sendiri. Itu semua dapat menimbulkan persaingan yang keras dalam mencari pekerjaan, bahkan mungkin sekali akan menimbulkan konflik sosial, dan tidak mustahil terjadinya pergolakan politik.³

PERSPEKTIF MOBILITAS SOSIAL

Data-data dari BPS lainnya,⁴ yaitu terutama tentang PDB nasional dan regional, juga menunjukkan bahwa seluruh bidang kehidupan masyarakat

³Myron Weiner, *Demografi Politik* (Yogyakarta: PPSK—UGM, 1981), hal. 52.

⁴BPS, *Statistik Indonesia 1975*, dan *Sensus Penduduk 1980, Seri S.2*, serta *Statistik Indonesia 1983*.

Tabel 5

**PRODUK DOMESTIK BRUTO ATAS DASAR HARGA KONSTAN
1973**

Lapangan Usaha	1978 (Milyar Rp)	1982 (Milyar Rp)	Kenaikan (%)
1. <i>Pertanian</i>	3.134,8	3.669,8	17,06
2. Pertambangan	1.048,8	939,8	-10,39
3. Industri	1.235,6	1.900,7	53,82
4. Listrik	56,9	105,5	85,41
5. Bangunan	528,9	757,8	43,27
6. Perdagangan	1.530,3	2.158,8	41,07
7. Angkutan	514,2	716,6	39,36
8. Keuangan	164,6	258,4	56,98
9. Sewa Rumah	287,6	377,4	31,22
10. Pemerintahan	767,9	1.114,5	45,13
11. Jasa	296,9	326,1	9,83
<i>PDB Non-Pertanian</i>	6.431,7	8.655,6	34,57
Total PDB	9.566,5	12.325,4	28,83

Sumber: BPS, *Statistik Indonesia 1983*.

Tabel 6

PENDUDUK YANG BEKERJA MENURUT LAPANGAN PEKERJAAN

Lapangan Pekerjaan	1971		1980		Kenaikan %
	Jumlah	%	Jumlah	%	
1. <i>Pertanian</i>	26.473.477	64,16	28.834.041	55,93	8,91
2. Pertambangan	85.828	0,20	387.251	0,75	351,19
3. Industri	2.681.952	6,49	4.680.051	9,07	74,50
4. Listrik	37.359	0,09	66.089	0,12	76,90
5. Bangunan	678.472	1,64	1.657.148	3,21	144,24
6. Perdagangan	4.261.561	10,32	6.678.952	12,95	56,72
7. Angkutan	951.354	2,30	1.468.419	2,84	54,35
8. Keuangan	93.462	0,22	302.345	0,58	223,49
9. Jasa-jasa	4.119.552	9,98	7.144.523	13,85	73,42
<i>Non-Pertanian</i>	14.787.739	35,83	22.719.081	44,06	53,63
Total	41.261.216	100,00	51.553.122	100,00	24,94

Sumber: BPS, *Statistik Indonesia 1975*;
BPS, *Sensus Penduduk 1980 Seri S.2*, hal. 240.

mengalami kemajuan (lihat Tabel 5). Di samping itu, ditinjau dari segi perkembangan penduduk yang bekerja menurut lapangan pekerjaannya, terlihat juga bahwa selama ini telah terjadi pergeseran-pergeseran dalam lapangan pekerjaan (lihat Tabel 6). Data dalam Tabel 6, menunjukkan bahwa persentase penduduk yang bekerja di sektor pertanian mengalami penurunan, yaitu dari 64,16 % dalam tahun 1971, menjadi 55,93 % dalam tahun 1980, atau turun sebanyak 8,23 %. Dan, selama tahun 1971 hingga 1980, jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian hanya meningkat 8,91 %. Sebaliknya, persentase penduduk yang bekerja di sektor-sektor non-pertanian mengalami kenaikan cukup tinggi, yaitu dari 35,83 % dalam tahun 1971, menjadi 44,06 % dalam tahun 1980, atau naik 8,23 %. Bahkan, jumlah penduduk yang bekerja di sektor-sektor non-pertanian selama tahun 1971 hingga 1980, meningkat secara pesat, yaitu dari 14.787.739 orang dalam tahun 1971, menjadi 22.719.081 orang dalam tahun 1980, atau selama sembilan tahun bertambah 7.931.342 orang, atau meningkat 53,53 %. Hal itu berarti bahwa selama tahun 1971 hingga tahun 1980, telah terjadi mobilitas sosial dari sektor pertanian ke sektor-sektor non-pertanian.

Data-data tentang perpindahan penduduk, menunjukkan bahwa sebagian besar para migran, baik yang ke Pulau Jawa maupun yang ke kepulauan lainnya, dan baik yang menetap di kota-kota maupun di pedesaan, berpendidikan rendah, yaitu para migran yang menetap di kota-kota, 8,10 % tidak sekolah dan 49,85% hanya berpendidikan sekolah dasar, sedangkan yang menetap di pedesaan, 18,82 % tidak sekolah dan 63,89 % hanya berpendidikan sekolah dasar. Namun demikian, jika dibandingkan dengan penduduk non-migran, ternyata tingkat pendidikan para migran relatif lebih tinggi daripada tingkat pendidikan non-migran. Ini berarti bahwa pendidikan mampu memacu mobilitas penduduk. Karena, orang yang berpendidikan, pandangannya lebih luas, serta lebih berani mengambil keputusan untuk pindah tempat tinggal dan pekerjaan guna memperbaiki atau meningkatkan mutu hidupnya.

Hasil suatu penelitian di Jawa Timur, menunjukkan bahwa faktor yang paling dominan dalam pengambilan keputusan untuk melakukan migrasi adalah faktor ekonomi, yaitu untuk mencari pekerjaan, bekerja, berdagang dan pindah pekerjaan.⁵ Akan tetapi, karena sebagian besar penduduk Indonesia, khususnya para migran, berpendidikan rendah, maka sebagian besar penduduk Indonesia dan para migran masih lebih banyak yang bekerja di sektor pertanian, sedangkan yang bekerja di sektor non-pertanian yang memerlukan ketrampilan atau keahlian, masih sedikit. Lagi pula, kalaupun

⁵Riwanto Tirto Sudarmo, *Migration Decision Making: The Case of East Jawa* (Jakarta: Leknas - LIPI, 1985), hal. 70.

Tabel 7

**PERSENTASE MIGRAN MENURUT PENDIDIKAN,
LAPANGAN PEKERJAAN DAN JENIS PEKERJAAN UTAMA (1980)**

Pendidikan, Lapangan dan Jenis Pekerjaan	Kepulauan					Indonesia	
	Sumatera	Jawa	Kalimantan	Sulawesi	Lainnya	Kota	Desa
Pendidikan :							
- Tak sekolah	17,97	8,72	19,50	17,18	11,73	8,10	18,82
- SD	65,34	51,17	54,73	57,49	52,17	49,85	63,89
- SLTP	7,81	15,80	11,70	10,21	15,07	16,23	8,37
- SLTA	8,85	24,27	14,06	15,10	20,99	25,79	8,88
- Tak Terjawab	0,03	0,04	0,01	0,02	0,04	0,03	0,04
- Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Lapangan Pekerjaan :							
- Pertanian	62,60	5,74	39,30	53,28	20,48	2,27	60,20
- Pertambangan, Pengolahan dan Bangunan	10,93	22,56	15,78	12,76	11,10	20,83	13,10
- Jasa	25,77	70,51	44,28	33,51	67,38	75,76	25,98
- Tak Terjawab	0,70	1,19	0,64	0,45	1,04	1,14	0,72
- Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Jenis Pekerjaan :							
- Profesional, Tehnisi dan Sejenis*	15,57	35,14	22,21	22,94	42,99	38,38	15,69
- Jasa	4,39	26,33	9,69	3,71	10,47	26,25	4,86
- Pertanian	62,48	5,61	38,34	52,53	20,41	2,20	59,82
- Produksi**	15,40	28,55	25,86	18,26	20,19	28,79	16,97
- Tak Terjawab	2,16	4,37	3,90	2,56	5,94	4,38	2,66
- Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Keterangan: * Termasuk tenaga kepemimpinan, ketatalaksanaan, tata usaha dan usaha penjualan.

** Termasuk operator alat angkutan dan yang sejenis.

Sumber: BPS Perpindahan Penduduk Antar Propinsi di Indonesia.

mereka mendapatkan pekerjaan, jenis pekerjaan utamanya jelas bukan sebagai tenaga profesional, kepemimpinan, ketatalaksanaan atau administrator.

Hal itu berarti bahwa mobilitas penduduk Indonesia yang berlangsung selama ini, lebih banyak yang berupa mobilitas horisontal, yaitu suatu peralihan individu atau obyek-obyek sosial lainnya dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya yang sederajat.⁶ Namun demikian, hal itu tidaklah berarti bahwa selama ini tidak ada penduduk yang mampu atau berhasil melakukan mobilitas sosial vertikal yang naik sama sekali. Karena, sejak Pelita I hingga sekarang, peluang terjadinya mobilitas vertikal yang naik semakin terbuka lebar, yaitu melalui saluran sekolah, kegiatan ekonomi, serta organisasi-organisasi fungsional, profesi dan politik. Hal itu semakin nyata terlihat dari beberapa indikasi, yaitu antara lain semakin banyaknya pemuda dan pemudi desa yang menjadi guru, anggota ABRI dan pegawai negeri lainnya serta karyawan perusahaan-perusahaan swasta, baik perusahaan swasta nasional maupun asing, bahkan banyak yang mampu menduduki posisi-posisi penting dalam lingkungan pekerjaannya. Hanya saja, jumlah ataupun persentase yang mampu melakukan mobilitas vertikal yang naik, masih sedikit.

PENUTUP

Dari uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa mobilitas penduduk Indonesia cenderung semakin meningkat dan dinamis. Namun demikian, ada kesan bahwa mobilitas penduduk selama ini masih belum banyak menunjang usaha pencapaian kehidupan yang lebih baik di masa mendatang. Karena, tingkat pendidikan sebagian besar penduduk Indonesia masih rendah, sehingga keberanian untuk melakukan pindah tempat tinggal ataupun pekerjaan yang dapat memberi penghidupan yang lebih baik pun masih rendah. Lagi pula, walaupun ada yang telah berani melakukan mobilitas sosial, tetapi karena pendidikannya sangat rendah, maka pekerjaan yang diperolehnya pun hanya sederajat dengan pekerjaan sebelumnya.

Di samping itu, sebagian besar para migran yang menetap di kepulauan luar Jawa, khususnya yang berasal dari Pulau Jawa, masih tetap bekerja di sektor pertanian yang luas dan daya dukung lahan pertaniannya mungkin sekali sangat terbatas, sehingga tidak akan mampu menjadi sumber penghidupan yang layak bagi generasi-generasi berikutnya. Sementara itu, para migran

⁶Soerjono Soekanto, *Sosiologi-Suatu Pengantar* (Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1977), hal. 150.

yang masuk di Pulau Jawa, sebagian besar menetap di kota-kota besar yang juga menjadi pusat urbanisasi penduduk pedesaan Pulau Jawa sendiri, sehingga dapat mempertajam persaingan dalam mendapatkan pekerjaan, meningkatkan jumlah pengangguran dan menimbulkan kampung-kampung miskin baru. Jika mobilitas penduduk seperti itu terus meningkat, mungkin sekali akan menimbulkan konflik sosial, yaitu antara lain berupa pergolakan dalam kesempatan kerja dan pertentangan para pendatang dengan penduduk setempat, sehingga tidak mustahil timbulnya pergolakan politik.

Oleh karena itu, aspek-aspek mobilitas penduduk tersebut perlu diperhatikan, supaya mobilitas penduduk berlangsung secara terarah, yaitu menunjang pemerataan penyebaran penduduk, pengembangan daerah-daerah dan peningkatan kesejahteraan. Mobilitas penduduk seperti itu dapat diarahkan dengan berbagai cara, yaitu yang terutama adalah dengan memperluas pemerataan pendidikan dan latihan, yakni antara lain dengan meningkatkan pelaksanaan kewajiban belajar dari tingkat SD sampai dengan tingkat SMP. Di samping itu, pengembangan daerah-daerah yang potensi ekonominya besar dan kepadatan penduduknya masih rendah juga perlu dipercepat. Dalam pengembangan daerah-daerah tersebut, prasarana lalu-lintas antar daerah dan pulaunya, perlu lebih diperhatikan, sehingga terjalin dalam rangkaian jaringan lalu-lintas lokal, regional dan nasional. Makin meningkatnya pendidikan penduduk, berkembangnya berbagai usaha non-pertanian dan lancarnya lalu-lintas antar pulau, diperkirakan tidak hanya meningkatkan mobilitas penduduk, melainkan juga memperluas interaksi sosial antar suku, sehingga akan mempercepat proses persatuan dan kesatuan bangsa.